



Dua Oknum PNS Akui Palsukan Tanda Tangan Bupati Bharata

Dua Aset Diduga Sudah Dijual

Gianyar (Bali Post) -

Dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Gianyar kini masih dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar. Dua oknum tersebut dipastikan sudah memalsukan tanda tangan Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata dalam kasus dugaan penggelapan uang sewa tanah aset Metro Pemprov Bali yang ada di wilayah Gianyar. Bahkan, ada indikasi dua oknum PNS ini sudah menjual dua aset milik negara.

Kasi Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Gianyar, Herdian Rahadi, menegaskan bahwa dua oknum PNS tersebut sudah memalsukan tanda tangan Bupati Gianyar, A.A. Gde Agung Bharata, dalam mekanisme sewa tanah aset Metro Pemprov Bali yang ada di wilayah Gianyar. Bahkan, ia sudah mengantongi rekaman dari pernyataan kedua oknum ini yang mengakui perbuatannya.

"Dua oknum ini sudah sempat dipanggil dan mereka mengakui sudah memalsukan tanda tangan Bupati yang sekarang (A.A. Gde Agung Bharata - red). Ada rekaman testimoninya sudah saya

pegang, jadi pembuktian sudah kuat," ungkapny saat dihubungi, Kamis (20/8) kemarin.

Kini, pihaknya masih menelusuri uang yang dikantongi kedua oknum ini. Ditambahkannya, aset yang disewakan dengan memalsukan tanda tangan Bupati Gianyar ini, bukan hanya seluruh tanah dari aset Metro Pemprov Bali di wilayah Gianyar, tetapi juga beberapa tanah yang tercatat sebagai aset Pemkab Gianyar. Paling mengejutkan ada dugaan bahwa ada dua aset di lokasi berbeda yang sudah dijual oleh kedua oknum yang hingga kini identitasnya masih dirahasiakan

tersebut.

"Kami masih selidiki dari proses sewa ini, berapa yang tidak disetorkan oleh kedua oknum ini. Tapi info yang saya terima, ternyata ada dua aset di lokasi berbeda yang sudah dijual oleh mereka, cuma aset yang mana masih kami telusuri," ujarnya.

Mempercepat proses penyelidikan, pihaknya memastikan minggu depan akan memanggil 58 orang yang tercatat sebagai penyewa dalam kasus ini. "Minggu depan, kita akan memeriksa 58 orang saksi yang dipastikan sebagai penyewa, supaya secepatnya bisa kita pastikan berapa uang sewa yang diselewengkan," kata Herdian Rahadi.

Disinggung soal inisial kedua oknum PNS tersebut, Herdian Rahadi belum mau mengungkapkan, lantaran kasus ini masih dalam proses penyelidikan. "Nanti dulu, kalau sudah kita tetapkan tersangka, baru kita akan ungkap identitas kedua ok-



Sambungan - - -

”Dua oknum ini sudah sempat dipanggil dan mereka mengakui sudah memalsukan tanda tangan Bupati yang sekarang (A.A. Gde Agung Bharata - red). Ada rekaman testimonia sudah saya pegang, jadi pembuktian sudah kuat.”

Herdian Rahadi
Kasi Pidsus Kejari Gianyar

num PNS ini, serta awal mula kasusnya. Paling cepat dua minggu lagi sudah kita pastikan tersangka atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun di lingkungan Pemkab Gianyar, salah seorang dari oknum tersebut, ternyata masih memegang jabatan di Bagian Perwat dan Aset Pemkab Gianyar. Sementara oknum yang satunya sudah dipindahkan ke bagian lain, sejak mencuatnya kasus ini. Namun, Kabag Perwat dan

Aset Pemkab Gianyar, Ketut Mudana, yang berulang kali dihubungi nomor ponselnya untuk konfirmasi, hingga Kamis sore kemarin, tidak aktif.

Diberitakan sebelumnya, diduga mengantongi aliran uang dari penyewaan tanah aset Metro Pemprov Bali yang ada di wilayah Gianyar, dengan memalsukan tanda tangan Bupati, dua oknum pegawai negeri di lingkungan Pemkab Gianyar kini dibidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar. (kmb35)



Kasus Jembatan Pangkung Lebong - Api Dua Tersangka Baru Diserahkan ke Kejari

Singaraja (Bali Post) -

Tim penyidik Polda Bali akhirnya kembali melimpahkan dua tersangka baru, dalam keterlibatan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api. Proyek ini persis berada di kawasan Desa Lemukih, Sawan. Tersangka pertama yang telah diserahkan adalah Made S. Dia sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menyusul tersangka baru tahap II, masing-masing berinisial WW sebagai PPTK dan Hajah HA selaku rekanan, Rabu (19/8) lalu.

penyerahan berlangsung bersama Tim Penyidik Polda Bali dan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Bali berlangsung lancar. Dua tersangka baru itu adalah Hajah HA selaku rekanan dan WW selaku PPTK. Selain itu, penyidik turut mengumpulkan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja. Artinya total tersangka seluruhnya pada kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, berjumlah tiga orang.

Nilai proyek tersebut menyebabkan kerugian negara Rp 669.999.871, dari nilai proyek yang didanai APBD Buleleng tahun 2013 sebesar Rp 2,5 miliar. Tindak pidana korupsi ini jelas merugikan negara. Kasus korupsi itu terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait proyek dimaksud. Belakangan diketahui persentase proyek selesai dikerjakan hanya 22 persen. Namun, di dalam pertanggungjawabannya, proyek dibuat telah menyelesaikan 45 persen. Jaksa penuntut umum Kejati Bali Wayan Meret, Rabu (19/8), di Kejari Singaraja menjelaskan, selama perkembangan kasus di lapangan, ada tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya telah diserahkan Tim Penyidik Polda Bali bersama JPU Kejati Bali, atas kasus dugaan tindak korupsi jembatan di Desa Lemukih. Kedua tersangka baru itu bahkan telah ditahan di Lembaga Perasyarakatan (LP) Kelas II B Singaraja. "Sebelumnya, sudah ada seorang tersangka, kami serahkan sebagai PPK. Sekarang ada dua yakni rekanan dan PPTK-nya. Nah sampai sekarang totalnya sudah ada tiga tersangka kami limpahkan ke Kejari Singaraja untuk ditindaklanjuti," jelas Meret.

Lebih lanjut, Meret belum dapat memastikan apakah masih ada tambahan tersangka baru atau tidak pada kasus korupsi itu. Ia masih melakukan penyidikan kasus itu. "Kita lihat saja nanti. Sekarang hanya baru tiga tersangka yang kami limpahkan," ucapnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Singaraja Wayan Suardi mengatakan, pihaknya, telah menerima berkas dokumen sebagai barang bukti proyek jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api yang berada di kawasan Desa Lemukih. "Kami tadi (kemarin-red) sudah menerima tersangka dan barang buktinya. Ada tiga tersangka sekarang dan itu akan kami tindak lanjuti segera, untuk menjalani persidangan di PN Singaraja dalam beberapa waktu ke depan," terangnya.

Atas perbuatannya, tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp 20 juta maksimal Rp 200 juta. (kmb34)

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015

Hal : 11



Bali Post/par

LAPANGAN UMUM - Rencana pembangunan pusat olahraga dengan memanfaatkan Lapangan Umum Petang, hingga kini belum terealisasi.

Ngambang, Rencana Pendirian "Sport Center" di Petang

Mangupura (Bali Post) -

Pembangunan *sport center* (pusat olahraga) dengan memanfaatkan Lapangan Umum Petang, sepertinya hanya isapan jempol belaka. Sebab, sejak diwacanakan dua tahun yang lalu, upaya untuk membuat wadah bagi para atlet ini mengambang dan belum terealisasi. Hingga kini, lapangan seluas 1,40 hektar hanya dilengkapi satu bangunan serta lapangan sepak bola saja.

Camat Petang Gusti Putu Ariawan saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/8) kemarin, mengatakan rencana pembangunan *sport center* di Petang ini memang sudah lama diusulkan. "Bahkan sudah kami usulkan dalam Musrenbang, tetapi pemerintah kan melihat skala prioritas," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tahun ini masih fokus pada pembangunan pelayanan publik, yakni pembangunan Kan-

tor Camat Petang sehingga tahun ini usulan *sport center* tersebut belum bisa terealisasi. "Rencananya, tahun 2016 mendatang akan kami usulkan kembali dalam Musrenbang," katanya.

Dia berharap, pada APBD Induk 2017 rancangan tersebut bisa dilaksanakan. Rencana *sport center* yang dibangun, seperti gelanggang olahraga yang tertutup. Di sana nanti bisa dimanfaatkan berbagai

kegiatan olahraga seperti basket, voli, bulu tangkis, panjat tebing dan sejumlah kegiatan olahraga lainnya. "Tidak hanya itu, bisa juga digunakan untuk kegiatan pertemuan berskala besar," ucapnya.

Perbekel Petang Wayan Suryantara menuturkan, pihaknya telah mengusulkan agar ada pembangunan *sport center* untuk melengkapi kegiatan masyarakat di Desa Petang. Pihaknya berharap anggota dewan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. "Yang kami butuhkan di sini adanya tempat untuk berolahraga yang representatif dan lapangan umum Petang sangat baik untuk dijadikan *sport center* ini," terangnya. (kmb27)



Pansus Aset DPRD Bali

Sepakat Jual Aset

Denpasar (Bali Post) -

Ketua Pansus Aset DPRD Provinsi Bali I Nyoman Gunawan sepakat untuk menjual aset Pemprov Bali yang kurang produktif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Semisal tanah *idle* atau tanah yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Tanah *idle* biasanya berukuran satu atau dua are.

"Pada intinya kita sepakat untuk anggaplah menjual aset-aset yang kurang produktif tetapi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan daripada nanti justru membebani APBD, anggaran daerah," ujarnya dikonfirmasi, belum lama ini.

Gunawan mengatakan, saat ini pihaknya memang belum mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur untuk menjual aset yang tidak produktif. Pansus aset, dikatakan, masih melihat kondisi aset untuk kemudian didata. Namun, politisi Golkar ini berpandangan, aset Pemprov yang tidak bisa dibangun untuk pelayanan publik, lebih baik dijual saja kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Apalagi, tanah-tanah *idle* juga sulit untuk dijadikan fasilitas umum. Bisa jadi, lokasinya terlalu ke dalam atau tidak bisa dijangkau kendaraan.

"Lebih baik dinego tetapi diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang juga lebih produktif. Daripada tidak dimanfaatkan, lebih baik dimanfaatkan sehingga nilai daripada transaksi jual-beli itu nanti mudah-mudahan bisa diarahkan untuk pendapatan daerah, untuk pengembangan aset," paparnya.

Gunawan optimis tanah *idle* khususnya di daerah perkotaan pasti akan cepat laku. Masyarakat diminta agar pintar memanfaatkan peluang ini nantinya. Kendati akan memasang kriteria, namun pihaknya tidak membatasi masyarakat yang mau membeli aset tersebut. Asalkan telah memenuhi ketentuan proses tender atau pelelangan.

"Yang pasti punya duit, kalau enggak punya duit ya... enggak bisa beli," ujarnya.

Gunawan menambahkan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memang sempat melontarkan pendapatnya untuk menjual aset yang nilainya tidak lebih dari Rp 5 miliar.

Hal. 19

Nilai Potensial

Nilai Potensial

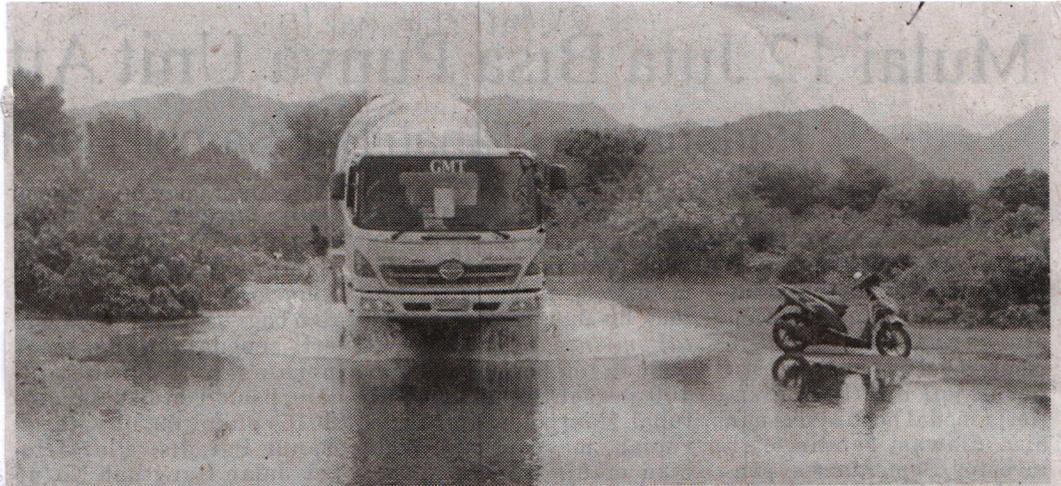
Dari Hal. 1

Namun, pihaknya tidak serta merta setuju karena harus dikaji terlebih dahulu. Ditegaskan, aset yang hendak dijual harus betul-betul berada di posisi tidak strategis dan tidak produktif. "Tetapi yang punya nilai potensial, itu kan sebaiknya dikembangkan. Salah satunya untuk fasilitas umum,"

jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Aset Pemprov Bali I Ketut Adiarsa mengatakan, Pemprov kurang lebih memiliki 50 sampai 70 bidang tanah *idle* di seluruh Bali. Aset-aset itu utamanya banyak berada di badan jalan. Namun untuk menjualnya diperlukan persetujuan Gubernur dan DPRD Bali, dengan mekanisme lelang umum. (kmb32)

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015
Hal : 1 dan 19



Bali Post/dwa

TERGENANG AIR - *Kendaraan yang akan menuju Dermaga Gunaksa kesulitan akibat akses jalan yang tergenang air dari luapan Sungai Unda.*

Proyek Akses Dermaga Gunaksa Tak Jelas Jalan Eks Galian C Masih Rusak

Semarapura (Bali Post) - Meski Pemkab Klungkung optimis Dermaga Gunaksa akan beroperasi pada 2016, ternyata jalan belum tersentuh perbaikan. Padahal anggaran Rp 40 miliar dari pusat tahun ini untuk akses menuju Dermaga Gunaksa sudah cair. Dengan waktu yang tersisa empat bulan lagi diperkirakan rencana membuat jalan hanya menjadi isapan jempol belaka.

Akses masuk menuju Dermaga Gunaksa direncanakan menggunakan sistem urug dan jembatan. Sedikitnya dibutuhkan empat jembatan untuk dapat menembus dermaga dengan panjang 515 meter dari keseluruhan 1,755 km. Tidak adanya pengerjaan akses menuju dermaga menyebabkan rencana untuk mengoperasikan Dermaga Gunaksa tahun depan pupus sudah. Bila tetap dipaksakan, akses jalan yang saat ini rawan banjir luapan aliran

Sungai Unda dapat membahayakan masyarakat.

Aliran Sungai Unda yang cukup besar di barat akses menuju Dermaga Gunaksa sering menggenangi akses menuju dermaga. Bahkan acap kali akses jalan terputus akibat terjangan banjir. Kondisi ini tentu sangat membahayakan penumpang yang melintasi jalan tersebut.

Kerusakan pada jalan bekas galian C tersebut kondisinya tidak layak untuk dilewati. Bahkan, tidak cocok

untuk akses menuju dermaga yang nantinya akan ramai dilalui kendaraan. Meski musim kemarau seperti saat ini, genangan air di akses jalan tersebut dapat mencapai setengah meter.

Saat dikonfirmasi terkait belum adanya pengerjaan akses menuju Dermaga Gunaksa, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Klungkung Nengah Sukasta tidak kunjung mengangkat telepon. (dwa)

Edisi : Jumat, 21 Agustus 2015

Hal : 10



Soal Panggilan Kejati Bali Dewan Serahkan ke Pimpinan

Semarapura (Bali Post) –

Informasi adanya anggota DPRD Klungkung yang dimintai keterangan di Kejati Bali terkait dugaan penyimpanan perjalanan dinas, membuat sebagian wakil rakyat di Bumi Serobotan kelabakan. Ada yang langsung bungkam ketika ditanya terkait informasi tersebut. Mereka kompak menyerahkan persoalan ini kepada unsur pimpinan DPRD untuk menjawabnya. Namun, ada juga yang pura-pura tidak tahu-menahu soal pemeriksaan.

Ketua Komisi I Komang Suantara ketika dikonfirmasi di ruang Fraksi Gerindra, Kamis (20/8) kemarin, memilih tidak berkomentar. Ia malah meminta agar wartawan langsung menanyakannya kepada unsur pimpinan di DPRD Klungkung. "Ada unsur pimpinan, lebih baik tanya langsung ke sana," ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Otal ini juga tidak mau menjawab ketika ditanya apakah ikut dipanggil ke Kejati Bali. Informasinya, tidak hanya unsur pimpinan di DPRD yang disebut-sebut dimintai keterangan di Kejati, melainkan juga ketua komisi. "Langsung saja tanya ke pimpinan," kilahnya.

Sebaliknya, anggota DPRD Klungkung lainnya, A.A. Bagus, mengaku tidak ada dimintai keterangan oleh Kejati. Politisi asal Gelgel ini sempat mendengar informasi tersebut dari media, tetapi tidak tahu substansi dari pemanggilan.

Hal sama juga dikatakan Ketut Suksma Sucita. Dengan nada bercanda, ia malah minta diperiksa jika ada informasi tersebut. Namun, politisi Partai NasDem ini membantah ada dimintai keterangan oleh Kejati. "Saya tidak ada dimintai keterangan. Informasinya, tidak hanya anggota DPRD yang dimintai keterangan, namun juga staf," katanya.

Dua unsur pimpinan DPRD, Nengah Arianta dan Ida Ayu Gayatri yang duduk sebagai wakil ketua, meminta agar menanyakan soal pemanggilan itu ke Ketua DPRD Wayan Baru. Hanya, politisi dari Partai Gerindra ini masih berada di Nusa Penida bersama Komisi II. (kmb)

Edisi : Jum'at, 21 Agustus 2015

Hal : 11